

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai tugas dan fungsinya

Tujuan Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS
2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya

3. Terlindungnya masyarakat dari dampak peyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja
4. Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha
5. Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.

Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Terpenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang
2. Terlindungnya anak, lanjut usia dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya
3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat
4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumberdaya manusia yang produktif
5. Terlindungnya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar
6. Mandiri fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif
7. Meningkatkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam penyelenggaraan pelayanan sosial
8. Tersedianya data informasi kesejahteraan sosial

Kebijakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Mengembangkan system bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamat dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda
3. Membangun apresiasi terhadap lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan
6. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

### **1.1.1 Anak Cacat**

Guna mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah Provinsi Sumatera barat melalui Dinas Sosial terus berupaya meminimalisir persoalan sosial yang ada ditengah masyarakat. Sesuai UU NO.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PP N0.39 tahun 2012, diselenggarakan kesejahteraan sosial melalui kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sesuai visi dan misinya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bertekad mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan aksesibilitas

layanan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS, mengembangkan fungsi sosial PMKS melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial dan partisipasi sosial masyarakat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsinya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak. Di Indonesia terdapat 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dua diantaranya yaitu Penyandang cacat (disabilitas) dan Anak Jalanan.

Difabel, disabilitas atau keterbatasan diri dapat berupa fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari semuanya. Difabel atau disabilitas merupakan istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh dan strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi individu dalam melaksanakan tugas dan tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang

dihadapi individu dalam keterlibatan disituasi kehidupan. Jadi penyandang cacat atau disabilitas merupakan suatu kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi penderitanya sehingga tidak mampu untuk hidup selayaknya.

**Berikut ini merupakan jenis-jenis penyandang cacat:**

1. Tunanetra

Merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguanya tuna netra dibagi atas dua yaitu buta total (total blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (low vision)

**Klasifikasi Tuna Netra**

Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan:

- a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir
- b. Tunanetra pada usia dewasa
- c. Tunanetra pada usia lanjut

Berdasarkan kemampuan daya penglihatan:

- a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir
- b. Tunanetra ringan
- c. Tunanetra setengah berat
- d. Tunanetra ringan



Berdasarkan faktor penyebab

a. Pre-Natal

Faktor penyebab ketunanetraan pada masa Pre-natal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan

b. Post-Natal

Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa Post-natal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir antara lain: kerusakan pada mata atau syarat pada waktu persalinan ibu menderita penyakit gonorrhoe, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, seperti trachoma, dan akibat kecelakaan.

2. Tunarungu

Tunarungu atau gangguan dengar adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.

**Klasifikasi tunarungu dibagi atas 3 :**

a. Tuli/gangguan dengar konduktif adalah gangguan dengar yang disebabkan kelainan ditelinga bagian luar dan/atau telinga bagian tengah, sedangkan saraf pendengarannya masih baik, dapat terjadi pada orang dengan infeksi telinga tengah, infeksi telinga luar atau adanya serumen di liang telinga.



b. Tuli/gangguan Dengar Saraf atau Sensorineural yaitu gangguan dengar akibat kerusakan saraf pendengaran, meskipun tidak ada gangguan di telinga bagian luar atau tengah.

c. Tuli/gangguan Dengar Campuran yaitu gangguan yang merupakan campuran kedua jenis gangguan dengar di atas, selain mengalami kelainan di telinga bagian luar dan tengah juga mengalami gangguan pada saraf pendengaran.

### 3. Tunawicara

Bisu, atau disebut pula dengan tunawicara dan gangguan bicara, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika (keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti antara sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat *intelektual* dan *autisme*. Seseorang dapat lahir bisu, atau menjadi bisu di kemudian hari karena cedera atau penyakit.

Ciri-ciri tunawicara :

- a. Berbicara keras dan tidak jelas
- b. Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya
- c. Telinga mengeluarkan cairan
- d. Menggunakan alat bantu dengar
- e. Suka melakukan gerakan tubuh
- f. Cenderung pendiam

#### 4. Tunalaras

Adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar.

#### **Klasifikasi anak tunalaras:**

Secara garis besar anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi, Sehubungan dengan itu, William M.C (1975) mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
2. Anak yang mengalami gangguan emosi.



### 1.1.2 Anak Jalanan

Merupakan seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan phsykis).

Yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidup yang terkadang mendapat tekanan fisik dan mental dari lingkungannya, umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan kehilangan kasih sayang sehingga membuat anak jalanan cenderung berperilaku negatif.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak anak jalanan harus senantiasa ditingkatkan, Hal ini mengingat anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak jalanan, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal sebagaimana yang dicanangkan pemerintah dalam gerakan wajib belajar 9 tahun dan tentu saja dengan biaya pendidikan gratis atau murah.

Di Sumatera Barat jumlah anak jalanan terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sedikitnya terdapat sekitar 2116 anak jalanan yang melakukan aktifitas dijalan setiap harinya, sedangkan untuk kota padang khususnya berjumlah 881 orang. Saat ini Dinas Sosial sudah mensosialisasi program rumah singgah bagi anak jalanan. Untuk menjalankan program tersebut perlu

adanya kerjasama antar beberapa LSM dengan rumah singgah tersebut. Secara teknis pembinaan akan diserahkan langsung pada rumah singgah, di padang terdapat 5 rumah rumah singgah yang masih aktif dari total 11 rumah singgah yang ada.

Dengan latar belakang seperti diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam masalah sosial penyandang cacat dan anak jalanan melalui dinas sosial. Maka penulis mencoba untuk menyusun laporan dengan judul “ **Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera barat** “

## **1.2 Latar Belakang**

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah:

- a. Apa yang menjadikendaladalampelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat dan anak jalanan
- b. Bagaimanaupaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat dan anak jalanan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untukmengetahuibagaimanaupaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat pada dinas sosial
- b. Untukmengetahuiapasaja yang menjadikendaladalampelaksanaan upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat pada dinas sosial

#### 1.4 Manfaat penulisan

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi akademis

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat dan anak jalanan

b. Bagi praktisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam pembahasan pelaksanaan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat dan anak jalanan dimasa yang akan datang.

#### 1.5 Waktu dan Tempat Magang

Untuk memenuhi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis melaksanakan magang yang sesuai dengan judul Tugas Akhir yang diajukan oleh penulis, yaitu Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera barat.

Pelaksanaan magang ini dilaksanakan dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016. Namun demikian, kegiatan magang dan penempatan penulis tergantung pada kesedian dan keputusan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Penulis mendapat bimbingan dari para staff dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat penulis laksanakan dengan sebaik-baiknya

## 1.6 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan tempat dan waktu magang, sistematika laporan.

### **BAB II :LANDASAN TEORI**

Berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tugas akhir ini.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat dan anak jalanan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis.